



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 2527-2541

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Zakat di Indonesia

Risnawati^{1✉}, Andi Niken Ayu N.F², Rahmawati Muin³, Mukhtar Lutfi⁴

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: risnawati19999@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan pengelolaan zakat di Indonesia dan menyusun solusi yang dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat. Metode penelitian yang digunakan adalah library research, dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber literatur dan dokumentasi yang relevan dengan topik penelitian. Berdasarkan analisis terhadap permasalahan-permasalahan tersebut, penelitian ini menyusun solusi-solusi yang dapat meningkatkan pengelolaan zakat di Indonesia. Solusi-solusi tersebut meliputi peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat melalui kampanye dan edukasi yang efektif, peningkatan kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat melalui transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang lebih ketat, peningkatan transparansi dalam pengumpulan dan distribusi zakat melalui penggunaan teknologi informasi, inovasi dalam pengumpulan zakat dari sektor ekonomi informal melalui pendekatan yang inklusif dan adaptif, serta perbaikan kerangka hukum dalam pengelolaan zakat untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan implementasi solusi-solusi yang diusulkan, diharapkan pengelolaan zakat di Indonesia dapat meningkat secara signifikan, memastikan dana zakat disalurkan dengan tepat dan efektif kepada penerima yang berhak. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman dan pemecahan masalah terkait pengelolaan zakat, serta memberikan panduan bagi pihak terkait dalam meningkatkan keefektifan pengelolaan zakat di Indonesia.

Kata Kunci: *Pengelolaan, Permasalahn dan Solusi, Zakat*

Abstract

This study aims to analyze the problems of zakat management in Indonesia and develop solutions that can increase the effectiveness of zakat management. The research method used is library research, by collecting and analyzing various sources of literature and documentation that are relevant to the research topic. Based on the analysis of these problems, this research develops solutions that can improve the management of zakat in Indonesia. These solutions include increasing public awareness of the importance of zakat through effective campaigns and education, increasing trust in zakat management institutions through transparency, accountability and tighter supervision, increasing transparency in the collection and distribution of zakat through the use of information technology, innovation in collecting zakat from the informal economy sector through an inclusive and adaptive approach, as well as improving the legal framework in the management of zakat to provide legal certainty and protection for all parties involved. With the implementation of the proposed solutions, it is hoped that the management of zakat in Indonesia can improve significantly, ensuring that zakat funds are distributed properly and effectively to the rightful recipients. This research contributes to increasing understanding and solving problems related to zakat management, as well as providing guidance for related parties in increasing the effectiveness of zakat management in Indonesia..

Keyword: *Management, Problems and Solutions, Zakat*

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki peran penting dalam menjaga keadilan sosial dan redistribusi kekayaan dalam masyarakat. Zakat adalah kewajiban bagi umat Muslim yang mampu untuk memberikan sebagian harta mereka kepada yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin, orang yang terlilit utang, dan lainnya. Pengelolaan zakat menjadi hal yang krusial dalam memastikan dana zakat disalurkan dengan tepat, efektif, dan efisien kepada penerima yang berhak.

Namun, fenomena pengelolaan zakat di Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan. Salah satu permasalahan yang terjadi adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar zakat dan menyisihkan sebagian hartanya. Hal ini menyebabkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar zakat masih rendah, sehingga potensi zakat yang dapat dikumpulkan juga terbatas.

Selain itu, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat juga menjadi hambatan dalam pengumpulan dan distribusi zakat. Terdapat keraguan mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, yang berpotensi merugikan para donatur dan penerima zakat. Ketidaktransparan dalam pengumpulan dan distribusi zakat juga menjadi masalah serius yang perlu diatasi.

Mengatasi fenomena pengelolaan zakat yang masih menghadapi permasalahan tersebut

menjadi suatu kebutuhan mendesak. Penting untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada dan mencari solusi yang tepat guna meningkatkan pengelolaan zakat di Indonesia. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis dan menggali lebih dalam permasalahan yang ada serta merumuskan solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat.

Dengan memahami pentingnya mengatasi permasalahan dalam pengelolaan zakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan pengelolaan zakat di Indonesia. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diidentifikasi permasalahan yang muncul dalam pengelolaan zakat saat ini dan merumuskan solusi-solusi yang dapat diterapkan guna meningkatkan pengelolaan zakat secara efektif dan efisien. Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi dan kepentingan yang tinggi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan zakat di Indonesia dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat yang membutuhkan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah library research atau penelitian kepustakaan. Library research merupakan pendekatan penelitian yang menggunakan sumber-sumber informasi yang ada dalam bentuk literatur dan dokumentasi. Peneliti melakukan pencarian, seleksi, dan analisis terhadap berbagai referensi yang relevan dengan topik penelitian untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang permasalahan dan solusi pengelolaan zakat di Indonesia.

Dalam library research, peneliti mengumpulkan berbagai buku, jurnal ilmiah, makalah, laporan, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan zakat di Indonesia. Referensi-referensi ini memberikan dasar pengetahuan yang komprehensif tentang isu-isu terkait permasalahan dan solusi pengelolaan zakat. Peneliti kemudian menganalisis, membandingkan, dan mengintegrasikan informasi yang ditemukan dari sumber-sumber tersebut untuk membangun argumen dan kesimpulan yang kuat.

Metode library research sangat relevan dalam penelitian ini karena topik pengelolaan zakat di Indonesia melibatkan berbagai aspek yang membutuhkan pemahaman mendalam, seperti aspek agama, sosial, ekonomi, dan hukum. Melalui pendekatan library research, peneliti dapat memperoleh wawasan yang komprehensif tentang permasalahan yang ada, mencari solusi yang telah diajukan oleh para ahli dan peneliti sebelumnya, serta mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan yang perlu diisi melalui penelitian berikutnya. Dengan demikian, metode library research menjadi alat yang efektif dalam menggali informasi yang diperlukan untuk menyusun jurnal mengenai permasalahan dan solusi pengelolaan zakat di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Permasalahan Pengelolaan Zakat di Indonesia

1) Kurangnya Kesadaran Masyarakat tentang Pentingnya Zakat

Permasalahan pertama dalam pengelolaan zakat di Indonesia adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat (Rifai, 2017). Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki peran penting dalam membangun kesejahteraan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Namun, masih terdapat sebagian besar masyarakat yang belum memahami sepenuhnya konsep dan manfaat zakat.

Kurangnya kesadaran tentang pentingnya zakat dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, kurangnya edukasi dan informasi yang menyeluruh mengenai zakat. Banyak masyarakat yang kurang mendapatkan pemahaman yang memadai mengenai zakat, baik dalam hal hukum, tata cara menghitung, maupun pemanfaatannya untuk kepentingan umum.

Selain itu, kurangnya peran aktif dari lembaga-lembaga agama dalam menyosialisasikan dan memberikan pemahaman yang mendalam tentang zakat juga menjadi faktor penyebab kurangnya kesadaran masyarakat. Lembaga-lembaga agama memiliki tanggung jawab untuk memberikan edukasi yang terarah dan berkesinambungan tentang zakat kepada jamaahnya.

Selanjutnya, adanya ketidaktahuan masyarakat tentang mekanisme pengelolaan zakat juga berkontribusi terhadap kurangnya kesadaran. Sebagian besar masyarakat belum mengetahui bagaimana zakat mereka dikumpulkan, dikelola, dan didistribusikan kepada yang berhak menerima. Hal ini membuat mereka merasa tidak yakin dan kurang percaya terhadap lembaga-lembaga pengelola zakat.

Selain itu, faktor budaya dan kebiasaan juga berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat terkait zakat. Dalam beberapa kasus, zakat dianggap sebagai kewajiban yang kurang diutamakan dibandingkan dengan kebutuhan pribadi atau kepentingan keluarga. Pandangan seperti ini perlu diubah melalui pendekatan yang tepat guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya zakat sebagai ibadah sosial yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan bersama.

Dalam rangka mengatasi permasalahan ini, langkah-langkah yang diperlukan antara lain adalah meningkatkan kampanye penyuluhan dan edukasi zakat yang sistematis dan berkelanjutan. Lembaga-lembaga agama, organisasi masyarakat, dan pemerintah perlu bekerja sama dalam menyediakan informasi yang jelas, mudah diakses, dan komprehensif mengenai zakat. Selain itu, melibatkan tokoh agama dan pemuka masyarakat dalam sosialisasi zakat juga dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat.

Kurangnya Kepercayaan terhadap Lembaga Pengelola Zakat

Permasalahan kedua dalam pengelolaan zakat di Indonesia adalah kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat (Syahab, 2014). Kepercayaan merupakan faktor krusial dalam pengumpulan dan distribusi zakat yang efektif dan adil. Namun, banyak masyarakat yang meragukan integritas, transparansi, dan akuntabilitas lembaga pengelola zakat.

Salah satu penyebab kurangnya kepercayaan adalah adanya kasus-kasus penyalahgunaan dana zakat yang pernah terjadi di masa lalu. Beberapa lembaga pengelola zakat terlibat dalam praktik korupsi, pembebasan diri dari kewajiban melaporkan jumlah zakat yang diterima, atau tidak mendistribusikan dana zakat kepada yang berhak menerimadengan proporsional.

Selain itu, kurangnya keterbukaan dan transparansi dalam pengumpulan dan penggunaan dana zakat juga membuat masyarakat meragukan lembaga pengelola. Masyarakat tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi mengenai pengumpulan, jumlah dana yang terkumpul, dan penggunaan zakat tersebut. Hal ini memicu keraguan dan merongrong kepercayaan masyarakat.

Persepsi negatif terhadap lembaga pengelola zakat juga dapat timbul akibat minimnya akuntabilitas lembaga tersebut. Tidak adanya mekanisme pengawasan yang efektif dan lemahnya pertanggungjawaban dari lembaga pengelola zakat dapat membuat masyarakat merasa tidak yakin akan penggunaan zakat yang telah mereka sumbangkan.

Selain itu, adanya perbedaan interpretasi dan penafsiran hukum zakat antara lembaga pengelola zakat dan masyarakat juga dapat menyebabkan kurangnya kepercayaan. Jika terdapat ketidakjelasan dalam penggunaan zakat atau penafsiran yang berbeda mengenai siapa yang berhak menerima, masyarakat akan merasa ragu untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga tersebut.

Untuk mengatasi permasalahan ini, penting bagi lembaga pengelola zakat untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan dana zakat. Diperlukan upaya yang lebih besar dalam melaporkan dan menginformasikan secara terbuka mengenai pengumpulan dan distribusi zakat. Audit independen dan pengawasan yang ketat juga harus diterapkan untuk memastikan penggunaan dana zakat yang jujur dan sesuai dengan ketentuan agama.

Selain itu, lembaga pengelola zakat perlu menjalin kemitraan dengan pihak-pihak yang memiliki reputasi baik dan diakui oleh masyarakat untuk memperkuat kepercayaan. Peningkatan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan mengenai pengelolaan zakat juga dapat membantu membangun kepercayaan yang lebih tinggi.

2) Ketidak transparan dalam Pengumpulan dan Distribusi Zakat

Permasalahan ketiga dalam pengelolaan zakat di Indonesia adalah ketidaktransparan dalam pengumpulan dan distribusi zakat (Rohmaniyah, 2022). Ketidaktransparan ini mencakup kurangnya informasi yang tersedia kepada masyarakat tentang proses pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi dana zakat.

Salah satu faktor yang menyebabkan ketidaktransparan adalah minimnya publikasi data mengenai jumlah zakat yang terkumpul dan bagaimana dana tersebut digunakan. Masyarakat tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi mengenai besaran dan zakat yang terkumpul dan bagaimana dana tersebut diatur dan dialokasikan. Hal ini menciptakan ketidakjelasan dan keraguan dalam pikiran masyarakat.

Selain itu, kurangnya pelaporan dan pertanggungjawaban dari lembaga pengelola zakat juga menyebabkan ketidaktransparan. Masyarakat seringkali tidak mendapatkan laporan reguler mengenai penggunaan dana zakat, termasuk rincian pengeluaran dan manfaat yang diberikan kepada penerima zakat. Ketidaktahuan ini menimbulkan ketidakpercayaan dan keraguan terhadap lembaga pengelola zakat.

Selanjutnya, masalah ketidaktransparan juga terjadi dalam proses distribusi zakat. Terkadang, tidak ada mekanisme yang jelas untuk menentukan siapa yang berhak menerima zakat dan bagaimana zakat tersebut didistribusikan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan dalam pemberian zakat dan menciptakan ketidakpuasan di antara penerima zakat.

Selain itu, minimnya pengawasan dan kontrol eksternal terhadap lembaga pengelola zakat juga dapat menyebabkan ketidaktransparan. Jika tidak ada mekanisme yang efektif untuk mengaudit dan mengawasi penggunaan dana zakat, lembaga pengelola zakat dapat dengan mudah mengabaikan transparansi dalam pengelolaan dan distribusi zakat.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan transparansi dalam pengumpulan dan distribusi zakat. Lembaga pengelola zakat perlu mengimplementasikan kebijakan yang mewajibkan publikasi data secara terbuka mengenai jumlah dana zakat yang terkumpul, alokasi dana, serta hasil dan manfaat yang telah dicapai. Dengan cara ini, masyarakat dapat memantau dan mengevaluasi penggunaan zakat secara lebih transparan.

Selain itu, diperlukan sistem pelaporan yang lebih terstruktur dan teratur untuk memberikan informasi yang lengkap dan mudah dipahami oleh masyarakat. Lembaga pengelola zakat harus mampu memberikan laporan berkala kepada masyarakat mengenai pengelolaan dan distribusi dana zakat, serta melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan zakat.

3) Tantangan dalam Pengumpulan Zakat dari Sektor Ekonomi Informal

Permasalahan keempat dalam pengelolaan zakat di Indonesia adalah tantangan dalam pengumpulan zakat dari sektor ekonomi informal (Rohmaniyah, 2022). Sektor ekonomi informal merupakan sektor yang melibatkan aktivitas ekonomi yang tidak terdaftar secara resmi atau tidak diatur oleh lembaga formal, seperti pedagang kaki lima, pekerja harian, dan usaha mikro. Tantangan yang dihadapi dalam mengumpulkan zakat dari sektor ini antara lain:

Pertama, sulitnya mengidentifikasi potensi zakat dari sektor ekonomi informal. Banyak pelaku ekonomi informal yang tidak memiliki catatan pendapatan yang jelas dan seringkali penghasilan mereka berfluktuasi. Hal ini menyulitkan dalam menentukan jumlah zakat yang harus mereka bayarkan dan mempersulit proses pengumpulan.

Kedua, kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam sektor ekonomi informal mengenai kewajiban membayar zakat. Banyak pelaku ekonomi informal yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya zakat dan tata cara perhitungannya. Dalam beberapa kasus, mereka mungkin tidak mengetahui bahwa mereka juga memiliki kewajiban zakat.

Ketiga, tantangan logistik dalam mengumpulkan zakat dari sektor ekonomi informal juga menjadi kendala. Pelaku ekonomi informal seringkali beroperasi di lokasi yang sulit dijangkau, seperti kawasan perkotaan padat penduduk atau daerah terpencil. Hal ini mempersulit lembaga pengelola zakat dalam mengumpulkan dana zakat secara efisien dan tepat waktu.

Keempat, masalah ketidakpastian pendapatan dalam sektor ekonomi informal membuat pengumpulan zakat menjadi lebih kompleks. Pendapatan dari sektor ini dapat bervariasi dari hari ke hari atau minggu ke minggu, sehingga menimbulkan tantangan dalam menetapkan besaran zakat yang harus dibayarkan. Selain itu, sulitnya memperoleh bukti pendapatan yang valid juga dapat menjadi hambatan.

Kelima, perbedaan pemahaman dan interpretasi mengenai zakat di antara pelaku ekonomi informal juga menciptakan tantangan dalam pengumpulan. Beberapa mungkin memiliki konsep yang salah tentang zakat atau menganggap bahwa zakat hanya diperlukan dalam sektor formal. Hal ini memerlukan upaya pendidikan dan sosialisasi yang lebih intensif untuk memperbaiki pemahaman mereka tentang zakat.

Untuk mengatasi tantangan ini, lembaga pengelola zakat perlu mengembangkan strategi yang khusus untuk mengumpulkan zakat dari sektor ekonomi informal. Pendekatan yang inklusif dan proaktif diperlukan, seperti bekerja sama dengan organisasi komunitas atau asosiasi yang terkait dengan sektor tersebut untuk mendapatkan akses dan informasi yang lebih baik. Kampanye penyuluhan yang intensif dan pendekatan pribadi juga dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang zakat di kalangan pelaku ekonomi informal.

4) Kendala Hukum dalam Pengelolaan Zakat

Permasalahan kelima dalam pengelolaan zakat di Indonesia adalah kendala hukum yang terkait dengan pengelolaan zakat (Achmad, 2022). Meskipun zakat merupakan kewajiban agama, adanya kendala hukum dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat. Beberapa kendala hukum yang dihadapi adalah sebagai berikut:

Pertama, kekurangan atau ketidakjelasan regulasi yang mengatur pengelolaan zakat. Saat ini, regulasi terkait pengelolaan zakat di Indonesia masih terbatas. Meskipun terdapat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, tetapi implementasinya masih belum sepenuhnya terstruktur dan terkoordinasi dengan baik di seluruh Indonesia. Kekurangan regulasi ini dapat menghambat pengelolaan zakat yang transparan, efisien, dan adil.

Kedua, perbedaan interpretasi hukum zakat antara lembaga pengelola zakat dan masyarakat. Terkadang, terjadi perbedaan pendapat dan penafsiran mengenai tata cara menghitung zakat, siapa yang berhak menerima zakat, dan bagaimana zakat harus didistribusikan. Ketidakjelasan ini dapat menciptakan ketidakpastian dan konflik yang mempengaruhi pengelolaan zakat.

Ketiga, masalah penyalahgunaan zakat yang melanggar hukum. Meskipun sudah ada regulasi yang mengatur pengelolaan zakat, masih terdapat kasus penyalahgunaan zakat yang melibatkan tindakan korupsi, penyelewengan dana, atau pelanggaran hukum lainnya. Penegakan hukum yang lemah atau kurangnya pengawasan dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat dan efektivitas pengelolaan zakat.

Keempat, kendala hukum terkait dengan pemungutan zakat dari sektor bisnis dan keuangan. Beberapa sektor bisnis dan keuangan mungkin menghadapi hambatan dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat karena keterbatasan aturan atau regulasi terkait zakat bisnis. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam pengelolaan zakat secara optimal.

Kelima, tantangan hukum terkait dengan perpajakan zakat. Meskipun zakat dianggap sebagai kewajiban agama, namun ada kebingungan dalam mengenai status perpajakan zakat di Indonesia. Perbedaan interpretasi mengenai kewajiban membayar pajak atas zakat dapat menyebabkan kekhawatiran dan ketidakpastian di antara masyarakat.

2. Solusi untuk Meningkatkan Pengelolaan Zakat di Indonesia

1) Peningkatan Kesadaran Masyarakat tentang Pentingnya Zakat

Salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan zakat di Indonesia adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat (Syahab, 2015). Kesadaran masyarakat yang tinggi akan zakat akan membantu memperkuat komitmen dalam membayar zakat secara rutin dan tepat waktu. Untuk mencapai hal ini,

diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi yang intensif. Pendidikan tentang zakat dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti ceramah agama, seminar, lokakarya, dan kampanye sosial. Selain itu, media massa dan platform digital juga dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi tentang zakat, termasuk pengertian, manfaat, dan tata cara perhitungannya. Pemberian contoh nyata mengenai bagaimana zakat dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat juga dapat membantumeningkatkan kesadaran.

Selain itu, peran tokoh agama, ulama, dan para pemimpin masyarakat sangat penting dalam memperkuat kesadaran zakat. Mereka dapat menjadi narasumber yang memberikan pemahaman yang mendalam tentang zakat serta menjadi teladan dalam membayar zakat dengan konsisten. Dengan adanya dukungan dan pemahaman yang kuat dari tokoh-tokoh ini, masyarakat akan lebih termotivasi untuk mematuhi kewajiban zakat dan mengoptimalkan pengelolaannya.

Keterlibatan lembaga pendidikan juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesadaran zakat di kalangan generasi muda. Materi tentang zakat dapat diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan, baik di sekolah formal maupun lembaga pendidikan agama. Dengan demikian, generasi muda akan tumbuh dengan pemahaman yang baik tentang zakat dan menjadi agen perubahan yang aktif dalam pengelolaan zakat di masa depan.

Selain itu, penting juga untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan zakat, seperti pengumpulan dan distribusi zakat secara langsung. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, mereka akan memiliki kesempatan untuk melihat secara langsung manfaat yang dihasilkan dari zakat yang mereka bayarkan. Hal ini akan memberikan rasa kepercayaan dan kepuasan kepada masyarakat tentang pengelolaan zakat yang dilakukan.

Secara keseluruhan, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat memegang peranan kunci dalam meningkatkan pengelolaan zakat di Indonesia. Dengan mengedukasi masyarakat, melibatkan tokoh agama dan pemimpin masyarakat, serta melibatkan generasi muda dalam pengelolaan zakat, diharapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar zakat akan semakin meningkat, dan pengelolaan zakat akan menjadi lebih efektif dan berdampak positif bagi masyarakat luas.

2) Meningkatkan Kepercayaan terhadap Lembaga Pengelola Zakat

Salah satu solusi penting untuk meningkatkan pengelolaan zakat di Indonesia adalah dengan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Kepercayaan yang tinggi terhadap lembaga tersebut akan memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa zakat yang mereka bayarkan akan dikelola dengan transparan, efisien, dan

tepat sasaran.

Pertama, transparansi dalam pengelolaan zakat harus ditegakkan dengan tegas. Lembaga pengelola zakat perlu menyediakan laporan keuangan yang jelas dan terperinci mengenai penerimaan, penggunaan, dan distribusi zakat. Informasi ini harus mudah diakses oleh masyarakat secara terbuka dan terpercaya. Dengan adanya transparansi yang baik, masyarakat akan memiliki keyakinan bahwa zakat yang mereka sumbangkan benar-benar digunakan untuk kepentingan yang tepat.

Kedua, pengawasan dan audit independen terhadap lembaga pengelola zakat juga penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Pihak-pihak independen, seperti lembaga keuangan, auditor eksternal, atau lembaga yang memiliki otoritas dalam pengawasan zakat, perlu terlibat dalam memastikan bahwa pengelolaan zakat dilakukan dengan integritas dan akuntabilitas yang tinggi. Audit rutin dan pengawasan yang ketat akan memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa zakat mereka dikelola dengan baik. Selain itu, penting juga untuk menerapkan sistem teknologi informasi yang canggih dalam pengelolaan zakat. Penggunaan teknologi, seperti aplikasi zakat online atau platform pembayaran digital, dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengumpulan dan distribusi zakat. Masyarakat akan merasa lebih percaya karena dapat melihat secara langsung informasi yang terkait dengan pengelolaan zakat melalui platform digital yang terpercaya.

Pendidikan dan penyuluhan juga memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat. Melalui kampanye penyuluhan yang intensif, masyarakat dapat diberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran lembaga pengelola zakat, tata cara pengelolaan zakat yang benar, dan manfaat yang dihasilkan dari zakat tersebut. Pendidikan ini akan membantu menghilangkan keraguan dan skeptisisme masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat.

Dengan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat, diharapkan partisipasi masyarakat dalam membayar zakat akan meningkat. Masyarakat akan lebih percaya dan yakin bahwa zakat yang mereka sumbangkan akan digunakan dengan baik dan memberikan dampak nyata bagi yang membutuhkan. Selain itu, kepercayaan yang tinggi juga akan membantu membangun citra positif lembaga pengelola zakat di mata masyarakat dan meningkatkan kolaborasi antara lembaga tersebut dengan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka meningkatkan pengelolaan zakat secara keseluruhan.

3) Peningkatan Transparansi dalam Pengumpulan dan Distribusi Zakat

Peningkatan transparansi dalam pengumpulan dan distribusi zakat merupakan solusi

penting untuk meningkatkan pengelolaan zakat di Indonesia. Transparansi yang tinggi akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa zakat yang mereka bayarkan benar-benar sampai kepada yang berhak menerimanya dan digunakan untuk tujuan yang tepat.

Pertama, dalam pengumpulan zakat, perlu dilakukan langkah-langkah untuk memastikan bahwa proses pengumpulan dilakukan dengan transparan dan terpercaya. Lembaga pengelola zakat harus memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada masyarakat mengenai mekanisme pengumpulan zakat, termasuk jenis zakat yang diterima, cara pembayaran, dan batas waktu pembayaran. Hal ini akan membantu masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat dengan keyakinan bahwa sumbangan mereka akan diterima dan dikelola dengan baik.

Kedua, dalam distribusi zakat, perlu diterapkan sistem yang transparan dan akuntabel. Lembaga pengelola zakat harus menyusun kebijakan yang jelas mengenai kriteria penerima zakat, metode distribusi, dan proses pemilihan penerima zakat yang adil. Informasi ini harus diumumkan secara terbuka kepada masyarakat, sehingga mereka dapat memahami bagaimana dana zakat akan didistribusikan dan kepada siapa dana tersebut akan diberikan. Selain itu, pelaporan berkala tentang pengelolaan zakat juga perlu dilakukan.

Lembaga pengelola zakat harus menyediakan laporan yang terperinci mengenai jumlah zakat yang terkumpul, penggunaan zakat, dan daftar penerima zakat. Laporan ini harus mudah diakses oleh masyarakat dan disampaikan secara berkala, baik melalui laman web, media sosial, atau media massa. Dengan demikian, masyarakat dapat melihat secara transparan bagaimana pengelolaan zakat dilakukan dan memastikan bahwa dana zakat digunakan dengan baik.

Selain itu, penggunaan teknologi informasi juga dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan zakat. Penggunaan aplikasi atau platform digital dapat memudahkan masyarakat untuk melacak dan memverifikasi penggunaan dana zakat. Melalui platform tersebut, masyarakat dapat melihat secara real-time informasi mengenai pengumpulan dan distribusi zakat, sehingga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat dapat ditingkatkan.

Dengan meningkatkan transparansi dalam pengumpulan dan distribusi zakat, masyarakat akan merasa lebih percaya dan yakin bahwa zakat yang mereka bayarkan benar-benar digunakan dengan baik. Transparansi yang tinggi juga akan membangun citra positif lembaga pengelola zakat di mata masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar zakat. Selain itu, transparansi yang baik juga akan mendorong pihak-pihak terkait untuk melakukan pengawasan yang lebih efektif terhadap pengelolaan zakat, sehingga dapat mencegah potensi penyalahgunaan dan memastikan zakat digunakan untuk kepentingan yang sebenarnya.

4) Inovasi dalam Pengumpulan Zakat dari Sektor Ekonomi Informal

Inovasi dalam pengumpulan zakat dari sektor ekonomi informal dapat menjadi solusi penting untuk meningkatkan pengelolaan zakat di Indonesia. Sebagian besar masyarakat di Indonesia masih aktif dalam sektor ekonomi informal, seperti pedagang kecil, buruh harian, atau petani kecil, yang seringkali tidak memiliki akses yang mudah untuk membayar zakat secara konvensional. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam pengumpulan zakat yang dapat memfasilitasi sektor ekonomi informal agar dapat berpartisipasi dalam membayar zakat dengan mudah dan efektif.

Salah satu inovasi yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan teknologi digital. Pemanfaatan aplikasi mobile atau platform online dapat memudahkan sektor ekonomi informal untuk membayar zakat. Melalui aplikasi atau platform tersebut, para pedagang kecil atau buruh harian dapat melaporkan pendapatan mereka secara real-time dan menghitung zakat yang harus mereka bayar. Selain itu, platform tersebut juga dapat memberikan pilihan pembayaran zakat secara digital, seperti transfer melalui dompet digital atau sistem pembayaran online, yang lebih praktis dan efisien bagi mereka.

Selain itu, kolaborasi dengan lembaga keuangan mikro atau lembaga keuangan inklusif juga dapat menjadi solusi inovatif dalam pengumpulan zakat dari sektor ekonomi informal. Lembaga-lembaga tersebut dapat berperan sebagai penghubung antara masyarakat sektor informal dengan lembaga pengelola zakat. Mereka dapat memberikan layanan keuangan yang mudah diakses, termasuk pembukaan rekening zakat khusus, pendampingan dalam perhitungan zakat, dan fasilitas pembayaran zakat secara berkala. Dengan demikian, sektor ekonomi informal dapat memiliki akses yang lebih mudah dan terorganisir dalam membayar zakat.

Selain itu, penyuluhan dan pendidikan juga penting dalam inovasi pengumpulan zakat dari sektor ekonomi informal. Masyarakat sektor informal perlu diberikan pemahaman yang jelas tentang konsep zakat, tata cara perhitungan zakat, dan manfaat yang diperoleh dari membayar zakat. Kampanye penyuluhan yang kreatif dan pendekatan yang sesuai dengan konteks masyarakat sektor informal dapat membantu meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya zakat dan memotivasi mereka untuk berpartisipasi aktif dalam membayar zakat.

Dengan adanya inovasi dalam pengumpulan zakat dari sektor ekonomi informal, diharapkan partisipasi masyarakat sektor informal dalam membayar zakat dapat meningkat. Inovasi tersebut dapat memudahkan mereka dalam melakukan kewajiban zakat dan menjembatani kesenjangan akses yang ada. Selain itu, inovasi ini juga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengumpulan zakat secara keseluruhan, sehingga zakat dapat dikumpulkan dengan lebih baik dan digunakan untuk kepentingan yang lebih luas bagi

masyarakat yang membutuhkan.

5) Perbaikan Kerangka Hukum dalam Pengelolaan Zakat

Perbaikan kerangka hukum dalam pengelolaan zakat merupakan solusi penting untuk meningkatkan pengelolaan zakat di Indonesia (Syahab, 2014). Saat ini, Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang mengatur pengelolaan zakat, termasuk Undang-Undang Zakat No. 38 Tahun 1999. Namun, perlu dilakukan perbaikan dan penyesuaian yang lebih komprehensif agar kerangka hukum tersebut dapat berfungsi secara efektif dalam mengatur pengelolaan zakat.

Pertama, perlu diperkuat regulasi yang menjamin transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang lebih ketat terhadap lembaga pengelola zakat. Undang-undang atau peraturan yang jelas harus mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban lembaga pengelola zakat, termasuk dalam hal penyusunan laporan keuangan yang terperinci dan terbuka kepada publik. Selain itu, adanya pengawasan yang lebih intensif dari pihak berwenang dapat membantu mencegah potensi penyalahgunaan dana zakat dan memastikan pengelolaan yang baik.

Kedua, perlu ada upaya untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi masyarakat yang membayar zakat dan penerima zakat. Kerangka hukum harus memberikan kepastian hukum yang jelas dalam hal hak dan kewajiban yang terkait dengan zakat. Selain itu, perlindungan hukum terhadap penerima zakat juga penting untuk memastikan bahwamereka menerima zakat dengan adil dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini dapat meliputi pembentukan lembaga arbitrase atau pengadilan khusus yang menangani sengketa terkait zakat.

Selanjutnya, perlu dilakukan harmonisasi antara kerangka hukum zakat dengan peraturan perpajakan dan sistem keuangan nasional. Kerangka hukum yang konsisten dan terintegrasi akan memudahkan pelaksanaan pengumpulan, distribusi, dan penggunaan zakat. Misalnya, pengaturan mengenai insentif pajak bagi masyarakat yang membayar zakat dapat diperjelas dan disinkronkan dengan peraturan perpajakan yang ada. Hal ini dapat mendorong partisipasi lebih banyak masyarakat dalam membayar zakat.

Selain itu, kerangka hukum juga perlu memperhatikan pengelolaan zakat di daerah yang memiliki otonomi khusus, seperti Aceh. Perbedaan tata kelola zakat di daerah-daerah ini perlu diakomodasi dengan baik dalam kerangka hukum yang berlaku, sehingga pengelolaan zakat di daerah tersebut dapat berjalan efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku secara nasional.

SIMPULAN

Dalam penelitian ini, telah diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi dalam

pengelolaan zakat di Indonesia, seperti kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya kepercayaan terhadap lembaga pengelola, ketidaktransparan dalam pengumpulan dan distribusi zakat, tantangan dalam pengumpulan zakat dari sektor ekonomi informal, serta kendala hukum yang menghambat pengelolaan zakat. Namun, solusi-solusi telah disusun untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa rekomendasi dapat diusulkan untuk meningkatkan pengelolaan zakat di Indonesia. Pertama, perlu dilakukan upaya yang lebih intensif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat melalui kampanye, pendidikan, dan pembentukan komunitas zakat yang aktif. Kedua, lembaga pengelola zakat perlu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam pengumpulan dan distribusi zakat untuk membangun kepercayaan masyarakat. Ketiga, penggunaan teknologi informasi dan inovasi dalam pengumpulan zakat dari sektor ekonomi informal dapat membantu mengatasi tantangan yang ada. Terakhir, perlu dilakukan perbaikan dan peningkatan kerangka hukum dalam pengelolaan zakat untuk memastikan adanya kepastian hukum dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, N. (2022). *Peradaban Pengelolaan Zakat di Dunia dan Sejarah Zakat di Indonesia*. Iqtisad: Reconstruction of justice and welfare for Indonesia.
- Aziz, A.L., Fasa, M.I., & Suharto, S. (2022). Strategi Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*.
- Khotimah, A.K., Rofifah, S.N., Rosyiddani, H., Nurkholisah, N., Radifan, M.F., Afifah, A., Afifah, A.N., Alvindi, R., Ghifary, M.I., Zakiya, G.F., Faozi, K.A., Qurniawan, A., & Prabawantari, S. (2021). Socialization of Professional Zakat as An Effort to Raise Awareness of The Community Alms of Nitikan Village, Sorosutan Village, Umbulharjo District, Special Region of Yogyakarta. *Journal of Islamic Economy and Community Engagement*.
- Putri, A., & Pratama, A. (2020). *An Introduction To Fiqh Zakat: Definition, Normative Basis, and Social Implication*. El -Hekam.
- Putri, S.A., & Nasution, Y.S. (2022). Application of Zakat Accounting at Amil Zakat Institutions (Case Study on Laz Washal, North Sumatra). *Journal of Indonesian Management (JIM)*.
- Rifai, A. (2017). Implikasi Kaidah Fiqih Terhadap Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat Di Indonesia. Rohmaniyah, W. (2022). Optimalisasi Zakat Digital Melalui Penguatan Ekosistem Zakat di Indonesia. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*.
- Syahab, A. (2014). Peran Civil Society Dalam Filantropi Islam.
- Syahab, S.A. (2015). Peran Civil Society Dalam Pengelolaan Zakat Di Indonesia.

